

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amin, Rahman, Pengantar Hukum Indonesia, (Deepublish: 2019, Sleman).
- Djulaeka, Devi Rahayu, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019),
- Efendi, A'an, Freddy Poernomo, Hukum Administrasi, (Sinar Grafika : 2017, Jakarta).
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris" (Depok: Prenadamedia Group, 2016 Hlm. 3
- Effendy, Marwan, Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005) halaman 138
- Fijnaut, Cyrille J. C.F., Leo Huberts, Corruption, Integrity And Law Enforcement, (Brill: Leiden, 2002) Halaman 4
- Hadiyanto, Alwan, Mas Subagyo Ekko Prasetyo, "Pengantar Hukum Pidana Dan Teori Hukum Pidana, (Jawa Timur: Cv. Penerbit Qiara Media, 2022), Halaman 178
- Hadrian, Endang, Lukman Hakim, Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Pemasalahan Eksekusi Dan Mediasi, (Yogyakarta: Deepublish, 2020) Hlm. 64-65
- Harahap, M. Yahya "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Irfan, H. M. Nurul, Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta: AMZAH, 2014)

- Ishaq, H., Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2018),
- Mariza, Prima Idwan Christian Orchard Tharanon Perangin-angin, Peranan Jaksa Pengacara Negara: Mengawal Aset Perkebunan Negara di Sumatra Utara, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2022)
- Pramono, Nindyo Sularto, Hukum Kepailitan Dan Keadilan Pancasila – Kajian Filsafat Hukum Atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia, (Yogyakarta : Andi, 2017)
- Qamar, Nurul, Farah Syah Rezah, Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal, (Makassar: Cv.Social Politic Genius (Sign))
- Qamar, Nurul, Amirudin, Dkk, Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (*Rechtstaat Or Machtstaat*), Makassar: Cv. Social Politic Genius (Sign), 2018.
- Rahim, A., Muh Ibnu Fajar Rahim, Pokok-Pokok Uoaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata, (Makassar: Humanities Genius, 2021),
- Sadi, Muhamad, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Kencana, 2017)
- Samosir, Djamanat, Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata (Bandung: Nuansa Aulia, 2011
- Simarmata, Hengki Mangiring Parulian, dkk, Pengantar Pendidikan Anti Korupsi, (Medan : Yayasan Kita Menulis, 2020)
- Susanti, Dyah Octorina, A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), (Sinar Grafika: 2014, Jakarta)

JURNAL ONLINE

Amin, Subhan, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat,
Jurnal El-Afkar Vol. 8 Nomor I, Januari-Juni 2019,
[Http://Dx.Doi.Org/10.29300/Jpkth.V8i1.1997](http://dx.doi.org/10.29300/jpkth.v8i1.1997), Halaman 2

Ardisasmita, M. Syamsa Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-
Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka,
Transparan Dan Akuntabel, Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem
Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jakarta 23 Agustus
2006 Halaman 4

Halilah, Siti, Mhd. Fakhurrahman Arif, Asas Kepastian Hukum Menurut Para
Ahli, Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara e-ISSN: 2656-9671, p-ISSN:2685-
6077 Volume 4, II (Desember 2021),

Hantoro, Novianto M. , Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Menghentikan Praktek
Hukum Liberal, NEGARA HUKUM: Vol. 6, No. 2, November 2015
[Https://Www.PnGunungsitoli.Go.Id/Assets/Image/Files/Konsep_Negara_Hukum
_Indonesia.Pdf](https://www.pnGunungsitoli.go.id/assets/image/files/konsep_negara_hukum_indonesia.pdf)

Kurniawan, I Wayan Edi, dkk, Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Putusan Pengadilan
Tindak Pidana Pembunuhan, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1, No. 2, 2020,
DOI: [http://doi.org/ 10.22225/jph.v1i2.2353](http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2353) , Halaman 156

Maggalatung, A. Salman Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara
Kekuasaan Otoriter, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah
Jakarta, Doi: [Https://Doi.Org/10.15408/Sjsbs.V2i2.2379](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2379)

Mulyani, Sri, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives), Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 3, September 2016

Polinsky, A. Mitchell, Steven Shavell, The Theory Of Public Enforcement Of Law, DOI: 10.1016/S1574-0730(07)01006-7,

Prayogo, R. Tony, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/Pmk/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review), Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 N0. 02 - Juni 2016,

Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan, Standar Operasional Prosedur Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan, 2019, Hal. 45

Pujiningrum, Wigati (Hakim Yustisial/Asisten Hakim Agung Pada Kamar Perdata), Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi, Diakses Dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurisprudensi>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1974 tentang Status Harta Kekayaan Ex PT.

Karkam/Aslam dan PT. Sinar Pagi Dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah dalam PT.P.P. Berdikari

Surat kepada TUA OPSTIBPUS No. K/021/OPSTIBDA/VIII/1982 tanggal 30 Agustus 1982

Surat Laporan kronologis status tanah milik H. A. Supandi dengan Nomor : B/1821/VII/2013 Tanggal 8 Juli 2013

Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Surat Penetapan Pengadilan Nomor : 11/2020.Eks